

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Berbagai negara berusaha membangun negaranya untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonominya agar taraf kemakmuran dapat di tingkatkan. beberapa negara telah mencapai pembangunan dan perkembangan kemakmuran yang cukup besar, namun walau bagaimanapun terdapat negara-negara yang belum mampu mengembangkan ekonominya, dalam hal ini kebijakan pemerintah dan pendekatan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan sumber-sumber yang tersedia, sangat penting peranannya di dalam usaha untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. termasuk Negara Indonesia yang saat ini sedang melakukan pembangunan besar-besaran untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik.<sup>1</sup>

Termasuk Indonesia sudah mulai mengalami pergeseran yang cukup baik. Hal tersebut merupakan suatu yang wajar yang dialami oleh setiap negara di seluruh dunia. Perjalanan bangsa-bangsa di dunia baik yang sudah maju maupun yang masih dalam kondisi Negara yang berkembang bahkan yang masih keterbelakangan, masalah utamanya adalah selalu menghadapi tantangan yang sama yakni tentang pertumbuhan pembangunan ekonominya. Negara berkembang selalu di latar belakang oleh proses modernisasi dalam kegiatan mempercepat pertumbuhan ekonominya. Karena pertumbuhan Negara-negara yang sedang berkembang itu tidak bias langsung melesat melainkan dengan tahap-tahap tertentu agar mereka bias menjadi Negara yang maju.

Masalah perekonomian disetiap negara adalah faktor yang kompleks bagi seluruh negara didunia karena juga menyangkut pertumbuhan ekonomi sebuah negara, hal tersebut juga diukur dengan pendapatan nasional tiap masing-masing negara. Untuk meningkatkan pendapatan nasional maka harus ditingkatkan juga faktor produksi baik dalam jangka panjang maupun pendeknya sehingga

---

<sup>1</sup> Sadono sukirno. "*Makro Ekonomi teori pengantar*", (Jakarta, Raja govindo persada, 2012) hal 441

menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang bagus di negara tersebut. Pembangunan terutama bidang ekonomi adalah indikasi berhasilnya suatu negara menumbuhkan peradabannya. Di dalam sebuah ruang lingkup makro ekonomi pendapatan nasional riil adalah alat ukur yang digunakan suatu negara dalam periode tertentu, ini mengindikasikan negara tersebut ekonomi tumbuh atau tidaknya perekonomiannya.<sup>2</sup>

Seluruh negara menginginkan kondisi ekonomi yang baik karena hal itu adalah bentuk capaian negara yang di pimpin oleh pemerintahan, hal itu merupakan dambaan seluruh pemerintahan di dunia. Indonesia juga termasuk negara yang menginginkan hal tersebut walaupun dari tahun ketahunnya pertumbuhannya sangat fluktuatif atau naik dan juga turun. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tumbuhnya perekonomian yakni Sumberdayanya terutama alam dan manusianya kemudian yang lainnya adalah pertumbuhan teknologi di negara tersebut serta ilmu pengetahuan yang didapat dari sumber daya yang ada dan kemusiaan di maksimalkan lagi.

Seringkali terlihat banyak pernyataan yang mengemukakan bahwa pembangunan suatu negara itu bertujuan untuk faktor sosial dan ekonomi yang sangat kompleks, pernyataan tersebut diletakkan dalam kampanye nasional dalam upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dengan asas kerjasama dan gotong-royong dalam mengembangkan dan membangun suatu warga negara sehingga akan tercipta negara yang lebih baik di kemudian hari dan masa yang akan datang.<sup>3</sup>

Indikator yang melihat negara itu baik atau buruk dalam segi ekonominya adalah tingkat total pendapatan dari masyarakatnya. Salah satu indikatornya ialah PDB atau Produk Domestik Bruto untuk melihat pertumbuhan atau perkembangan ekonomi disuatu negara dalam kurun waktu tertentu atau periodenya. Pemerintah negara manapun termasuk negara indonesia berharap PDB tersebut akan terus

---

<sup>2</sup> Dewi Arnita, Syamsul Amar, Efrizal Syofyan, "Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Dan Konsumsi Di Indonesia", Jurnal Kajian Ekonomi, Vol. 1 No. 2, 2013, Hal 176

<sup>3</sup> Michael P Todaro, Steven C Smith, "Pembangunan Ekonomi Jilid 2 Edisi Kesembilan", ( Jakarta : Erlangga , 2006) Hal 8

meningkat hal itu juga guna mengurangi angka kemiskinan yang ada, dalam tanda kutip pemerintah juga harus bisa memaksimalkannya banyak langkah untuk membuat PDB meningkat.<sup>4</sup>

Mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi harus dikelola dengan baik. Jika bisa dikelola dan dilaksanakan dengan baik maka pastinya pendapatan masyarakat di negara tersebut diharapkan bisa merata serta optimal dan bisa dinikmati semua masyarakat tidak hanya masyarakat tertentu. Masalah ini semua belum merata untuk pertumbuhannya terutama dalam masalah ekonomi karena yang menikmati hanya sebagian saja. Namun bila hasil pertumbuhan ekonomi tidak merata maka juga kurang ada manfaatnya buat mengatasi angka kemiskinan yang ada pada suatu negara karena kurang melibatkan semua golongan yang ada.

Hal yang menjadi pokok masalah adalah tentang kemiskinan di banyak negara-negara didunia termasuk negara kita, manusia sangat sering menghadapi masalah ini. Masalah ini adalah masalah tentang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat yang ada banyak disekitar kita bahkan menjadi masalah kompleks di berbagai negara lain, yang berarti masalah ini juga di perhatikan di dunia, walaupun berdampak beda namun masalah ini tetap ada di tiap masing-masing negara walaupun itu dinegara maju sekalipun.<sup>5</sup>

Menurut agama islam miskin adalah orang yang bisa di katakan *kasab* atau (usaha) tetapi belum cukup untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya atau disebut kebutuhan primer.<sup>6</sup> Masalah ini adalah masalah tentang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Bertambahnya masalah tentang kemiskinan biasanya di tambah dengan masalah-masalah lain semacam kriminalitas bahkan bisa menjadi pembatas interaksi sosial yang ada dimasyarakat dan menciptakan garis stratifikasi yang ada didalamnya. Bahkan dampak yang timbul juga bisa merusak peradaban yang suah ada. Nabi Muhammad pernah berkata bahwa kemiskinan ini bisa menimbulkan

---

<sup>4</sup> Jasmine Fitri Andriani, "Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Dan Penyaluran Zakat, Infak, Dan Sedekabandan Amil Zakat Nasional Terhadap Kemiskinan Di Indonesia", Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, Vol. 6 No. 7, 2019, Hal 1476-1477

<sup>5</sup> Nunung Nurwati, "Kemiskinan :Model Pengukuran, Permasalahan Dan Alternatif Kebijakan", Jurnal Kependudukan Padjadjaran, Vol. 10, No. 1, 2008, Hal 2

<sup>6</sup> Ahmad Hasan Ridwan, "Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil", (Bandung : Pustaka Setia , 2013) Hal 199

kekufuran, maka dari itu masalah ini harus segera di atasi dengan menciptakan strategi-strategi baru untuk mengatasinya sehingga dapat menimbulkan kesejahteraan bagi masyarakat.<sup>7</sup>

Kondisi tersebut bahkan sudah sangat menyebar sampai ke pelosok yang ada di sebuah daerah. Kondisi serba kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup maka menyebabkan lemahnya ekonomi dan strukturnya. Apalagi kemiskinan ini menjadikan kehidupan yang tidak seimbang dan tumbuh kembang perekonomian jadi kurang merata. Jadi kekurangan kemampuan manusia yang belum bisa terpenuhi kebutuhan pokoknya atau primernya akan jadi perhatian bersama kita semua dan membutuhkan berbagai lembaga untuk membantu menyelesaikannya.<sup>8</sup> Misalnya lembaga Badan Pusat Statistik atau BPS yang menghitung angka kemiskinan itu menghadirkan konsep kemampuan untuk bisa terpenuhi kebutuhan yang mendasarnya

Pendekatan ini mengungkapkan bahwa kurang mampunya manusia untuk bisa terpenuhi kebutuhannya tersebut terutama pangan dan non pangan, alat ukur tersebut adalah besarnya pengeluaran tiap bulannya. Tahun 2019 garis kemiskinan BPS adalah sebesar Rp. 425.250 perbulannya itu penetapannya. Kabupaten Tuban juga menghadapi hal yang sama yakni faktor kemiskinan.

Adapun ini adalah tabel representatif indeks kemiskinan yang ada di Kabupaten Tuban:

**Tabel 1.1**  
**Presentasi Kemiskinan Kabupaten Tuban**  
**Tahun 2015-2021**

<b>Kemiskinan</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Jumlah Penduduk Miskin	192580.00	187130.00	170800.00	178640.00	196100.00	198350.00	196590.00

<sup>7</sup> Siti Nur Azizah, "Efektivitas Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pada Program Pentasharufandana Zakat Di Baznas Kota Yogyakarta", Jurnal el-JIZYA, Vol. 6 No. 1, 2018, Hal 91-92

<sup>8</sup> Rusyda Afifah Ahmad, "Tantangan Dalam Pengentasan Kemiskinan: Peran Lembaga Keuangan Mikro Islam Dan Keuangan Sosial", Prosiding Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat 2020 (SNPPM-2020), ISBN 978-602-99618-9-8, 2020, Hal 49

Persentase Penduduk Miskin	16.31	0,6881944 44	14.58	15.31	0,7270833 33	17.14	17.08
P1 (Kedalaman Kemiskinan)	03.26	02.27	0,1416666 67	02.55	03.29	03.03	0,1513888 89
P2 (Keparahan Kemiskinan)	0,0597222 22	00.48	0,0520833 33	0,0451388 89	0,0631944 44	0,0569444 44	0,0548611 11
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)	388176.00	371465.00	348503.00	328268.00	308822.00	294543.00	277599.00

Sumber : tubankab.bps.go.id<sup>9</sup>

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Garis Kemiskinan (GK) menunjukkan angka yang cukup bervariasi dan terjadi situasi naik turun atau *Fluktuasi* ditahun 2015 sampai 2022.

Faktor lain diluar tumbuhnya perekonomian yang berpengaruh pada angka Kemiskinan ialah termasuk Zakat Infaq Shadaqah, pendistribusian alokasi faktor ini yang tepat maka akan bisa mengurangi angka tersebut dan lembaganya adalah BAZNAS ( Badan Amil Zakat Nasional) Indeks Pembangunan Manusia, Dan juga PDRB yang mempengaruhi kemiskinan. Walaupun ada faktor selain itu tapi yang kita bahas disini adalah 3 fakto tersebut.

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial dengan cara yang sangat sempurna, maka sudah sapatutnya kita sebagai makhluk sosial harus dapat bersyukur kepada seluruh nikmatnya dengan keadaan apapun itu selayaknya harus memberikan sebuah atau suatu dampak bagi lingkungan sekitar juga. Misalnya bisa bermanfaat bagi kehidupan sekitar seperti beramanah dengan mebayar Zakatnya, Infaqnya, maupun bershadaqah bagi yang membutuhkan hal inipun juga termasuk kewajiban kita bila mempunyai harta yang berlebih. Menggunakan uang dengan

<sup>9</sup> tubankab.bps.go.id di akses pada tanggal 11 Pukul 20:09

baik dengan bayar zakat ialah rukun yang ke 3 kita pada ketaatan iman kita dalam islam. Pentingnya subjek pilar ketiga dari lima rukun islam.<sup>10</sup>

Tokoh seperti Yusuf Al Qurdhowi membuat pernyataan yang terbilang bahwa setiap manusia harus dapat memenuhi kebutuhan materinya bahkan spiritualnya. Jika tidak ada semacam ini manusia baik kuat atau merdekapun belum terpenuhi kebutuhannya. Menurutnya lagi setiap individu wajib berkembang terutama untuk menyiapkan dirinya dimasa yang akan datang. Dasarnya ada Alquran Surat Al-taubah ayat 122 :

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka Telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”<sup>11</sup>

Untuk menyeimbangkan kehidupan duniawi dan akhirat nanti maka harus berperan dan mempunyai keahlian di tiap masing-masing agar potensi zakat yang diatur dalam berbagai tugas menjadiimbang sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan kepentingan hal yang lain. Manfaatnya adalah zakat nantinya bisa terbyarkan dengan baik dan tersampaikan pada yang membutuhkannya.<sup>12</sup>

Urgensi membayar zakat adalah sesuai dengan ajaran agama kita yakni islam. Nabi Muhammad SAW juga menegaskan sekali akan hal itu dalam hadist yang mempunyai arti “ Islam dibangun atas lima hal; kesaksian sungguh tiada tuhan selain Allah, sungguh Muhammad adalah utusan Allah, pelaksanaan shalat, pembayaran zakat, haji dan puasa Ramadhan, ” (Bukhari dan Muslim). Ma’lum minad din bid dharuri dapat diartikan bahwa Zakat ajaran Islam yang ajaran agama yang diketahui secara luas baik oleh orang alim maupun orang awam dan ini

<sup>10</sup> Yadi Janwari, "Peradaban Ekonomi Islam Pada Masa Keemasan Dan Kebangkitan Islam", Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2017, Hal 185

<sup>11</sup> Al jumanatul Ali, Al Qur'an Dan Terjemahan Hal 216

<sup>12</sup> Wiwik Damayanti, Ita Dwi Lestari, dan Budi Wahyono, "Dimensi Zakat Dalam Keadilan Sosial (Studi Komparasi Pemikiran Yusuf Al Qardhawi dan Masdar Farid Mas'udi)", Jurnal Mahkamah Vol.3 No.1, 2013, Hal 16-17

adalah tepat sekali sesuai dengan perintahnya yaitu wajib membayarkannya. bahkan jika ingkar membayarkannya maka akan menimbulkan rasa kufur pada dalam dirinya sendiri atau tidak bersyukur atas nikmatnya. Kewajibannya juga tertulis di Alquran surat Al-taubah ayatnya 103 dan Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka”<sup>13</sup>

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاِكِعِينَ

“Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah bersama dengan orang-orang yang ruku”<sup>14</sup>

Zakat mempunyai substansi yang dimensinya dua atau biasa disebut *murakkab*, yang pertama *ta,abudi* (penghambaan untuk Allah), serta sosial dimensi. Objek utamanya yakni terpenuhinya kebutuhan para mustahiq ialah orang yang berhak menerima zakat untuk bisa memenuhi kebutuhannya serta kemiskinannya sedikit berkurang sehingga suatu saat bisa menjadi penolong juga yakni pemberi zakat.

Untuk *ta,abudi* sendiri juga penting, urgensinya di pendistribusian, perhitungan, dan peraturan yang lain yang harus dilakukan para pemberi zakat atau *Muzakki*, yang nantinya bisa sesuai syariat agama yang telah ditetapkan. Imam syafi,i juga mensejajarkan hal ini dengan rukun islam yang lain, baik sholat, juga puasa, bahkan ibadah haji.

Pada hal ini dimaksudkan bahwasanya masyarakat yang dulunya menjadi seorang penerima zakat nantinya juga bisa menjadi pemberi zakat sehingga hal ini juga wajib dilaksanakan juga mustahiq bisa menjadi seorang muzakki bahkan bisa lebih seperti berinfaq maupun bershadaqah. Maka dapat disimpulkan bila sudah mampu maka wajib hukumnya untuk membayar atau mendistribusikan dengan

<sup>13</sup> Al jumanatul Ali, Al Qur’an Dan Terjemahan Hal 203

<sup>14</sup> Al jumanatul Ali, Al Qur’an Dan Terjemahan Hal 7

baik bisa juga melalui lembaga tertentu yang sudah ada disekitarnya biar tersampaikan dengan maksimal.

Kontribusi ZIS dalam membantu perekonomian adalah sangat dibutuhkan di zaman sekarang ini, di Indonesia sendiri sekarang sudah ada badan yang menghimpunnya. Sebenarnya baik zakat, infaq dan shadaqah dari zaman saudagar sudah ada namun belum terlalu banyak kontribusinya dan belum terstruktur seperti sekarang ini. Badannya sendiri di Indonesia diberi nama BAZNAS atau Badan Amil Zakat Nasional.

Peranan ZIS justru sekarang sangat diperhitungkan dan cukup penting terutama dalam hal mengentaskan kemiskinan dan tumbuhnya perekonomian. Hal ini juga berbeda dengan hal yang lain seperti pajak dan lain sebagainya yang ada di negara kita,. Untuk membayar ZIS itu gunanya hanya memperoleh ridho Allah SWT semata. Bahkan sekarang mekanisme yang ada itu dikontrol dengan baik.

Membayar atau menunaikan ibadah yang agama islam yang ketiga ini adalah bisa di lihat yang awal yakni bukti ketaatan kita kepada Tuhan merupakan bagian keimanan seseorang. Selanjutnya ialah yang kedua yakni harta tidak akan pernah berhenti atau putus sumber keuangannya, karena pada setiap periodenya juga diharuskan untuk membayarkannya. Yang paling utama dalam ranah sosial yakni menghapus sekat atau kesenjangan masalah sosial yang ada sehingga diharapkan timbul redistribusi dan ratanya pembangunan. Pemerintah dan juga peranan masyarakat lain yang dapat membantu pastinya akan menimbulkan dampak yang cukup positif seperti hilangnya kesenjangan sosial dan kemiskinan juga akan terentaskan jika dikelola dengan bijaksana dan tepat sasaran, harapannya adalah seperti itu. Karena merupakan aspek ibadah yang bisa berdampak ke aspek lingkungan sosial dan menciptakan kemandirian ekonomi dan diharapkan bisa membuat masyarakat sejahtera.

Harapan yang selalu didambakan oleh suatu hamba adalah bahagia baik akhirat atau duniawinya itu bisa dicapai oleh seluruh aktivitas yang akumulatif, yaitukalau dulu melakukan jihad perang sekarang bisa berjihad melalui zakat yang berada di

jalan yang benar yakni jalan Allah SWT. Era modern membayar zakat itu juga hal yang termasuk beriman kepada Allah SWT. Dalam hal ini institusi pun juga menjadi tolak ukuran yang cukup subjektif yakni bisa di lakukan dorongan sehingga mampu mengelola dengan baik bahkan bisa produktif sehingga akan tercipta hal baru untuk sejahterahnya para penerima zakat yang ada seperti contohnya lapangan usaha, itu bisa dimasukkan dalam program kerjanya .<sup>15</sup>

Tugas dan peran pemerintah setempat sangat dibutuhkan dalam hal ini yakni membina, memberi hak dan perlindungan serta bisa melihat aspek sehingga nantinya bisa menjadikan kesadaran bagi para *muzakki* itu akan meningkatkan jumlah penerimaan zakat, semakin meningkat penerimaannya maka semakin banyak yang akan didistribusikan sehingga akan banyak mengurangi angka tingkat kemiskinan dan masyarakat akan tujuannya masyarakat akan lebih sejahtera. Sebagaimana yang tertulis pada Undang-undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat.

Dinegara kita sendiri semua sudah di atur oleh perundang-undangan pada tahun 1999 yang nomor 23 itu bahwa itu adalah tentang daya kelola zakat dan juga ada di KMA (keputusan menteri agama) pada tahun 1999 dan nomor 581, keputusan tersebut ada di Perundang-undangan juga tentang pelaksanaan Tahun 1999 dengan Nomor 38 dan ada juga Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dan sebenarnya putusan tersebut masih perlu di perbaiki namun sudah cukup bagus karena sudah menjadi dorongan untuk para *muzakki* agar bisa membayarkan kewajibannya dengan tepat sehingga dapat dipercaya masyarakat atas lahirnya badan tersebut .<sup>16</sup>

Agama Islam sebagai agama yang penuh dengan rahmat Allah SWT sudah mengatur sistem perekonomian umatnya. konsepnya sudah jelas dalam membantu masalah kemiskinan. Apalagi negara kita Indonesia dalam menghadapi masalah

---

<sup>15</sup> Ahmad Hasan Ridwan, Irfan Safrudin, “*Dasar-Dasar Epistemologi Islam*”, (Bandung : Pustaka Setia, 2011) Hal 448

<sup>16</sup> Muhammad Nizar, “*Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat, Infaq Dan shadaqah (Zis) Di Masjid Besar Syarif HidayaiTullah Karangploso Malang*”, Jurnal Malia, Volume 8, Nomor 1, 2016 Hal 41-43

tersebut sangat mudah karena banyak hal lain yang bisa dilakukan, bahkan seperti adanya asas keadilan sosial konsepnya itu menuntut berbuat adil kepada sesama manusia dinegara kita.konsep yang dibangun adalah konsep syariat melalui zakat. melalui Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) Pemerintah akan mendorong reformasi zakat untuk pengentasan kemiskinan, itu bertujuan dana zakat bisa digunakan membantu juga seperti halnya dana APBN atau (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dalam mengentaskan kemiskinan.<sup>17</sup>

Pengelolaan zakat yang diatur undang-undang tahun 2011 Nomor 23 ,zakat diartikan harta yang harus dikeluarkan setiap muslim serta badan usaha dan nantinya diberikan pada yang berhak mendapatkannya. Infaq diartikan harta yang harus dikeluarkan setiap muslim serta badan usaha yang bukan zakat dan nantinya diberikan untuk bisa di manfaatkan khalayak umum yang terakhir ialah shadaqah adalah diartikan harta atau nonharta yang harus dikeluarkan setiap muslim diluar zakat serta badan usaha dan nantinya diberikan untuk bisa di manfaatkan khalayak umum. Intinya bisa bermanfaat bagi yang lainnya.

Pemerintah telah membentuk Badan Amil Zakat Nasioanal BAZNAS dalam melakukan pendistribusiannya, pendayagunaan zakat, serta pengumpulannya. Masyarakat juga dapat berkontribusi dalam hal ini dengan membuat LAZ atau (Lembaga Amil Zakat), kemudian lembaga ini harus juga lapor ke BAZNAZ agar nantinya bisa diaudit disana sehingga dana yang terkumpul dan terdistribusi bisa tercatat dengan jelas.

Adapun dinegara kita untuk lembaga tersebut atau OPZ ( Organisasi Pengelola Zakat) antara lain ada BASNAZ dan itu sudah ada Pusat, Provinsi, Maupun Kabupaten atau Kota. Demikian juga LAZ itu juga ada di pusat, provinsi dan kota atau kabupaten. Sesuai Undang-undang yang ada yakni nomor 23 tahun 2011 OPZ harus lapor juga ke BAZNAS. Dan jenis yangdihimpun OPZ ini antara lain pertama dana zakat termasuk maal dan fitrah, yang kedua yakni dana-dana infaq para pemberi baik *muqayyadah* atau *ghair muqayyadah* (terikat dan tidak terikat), yang

---

<sup>17</sup> Dahlia Oktamia, Ahmad Zainuri, dan Peny Cahaya Azwari, "Social Return on Investment pada Program Ekonomi Local Business Development Dompot Dhuafa Sumatera Selatan", Jurnal Intizar Vol. 26 No. 2, 2020, Hal 66

ketiga ada DSKL atau (Dana Sosial Keagamaan Lainnya) seperti contoh nadzar, amaaah, harta pusaka yang tidak punya ahli warisnya, kafarat, kurban, hibah, atau bahkan sitaan serta biaya administratif pengadilan di PA (Peradilan agama), yang terkahir atau keempat ialah dana lain-lain misalnya bagi hasil bank yang dari bagi hasil yang jadi saluran terhimpunnya dana yang telah dipaparkan.

Berikut ini adalah tabel pengumpulan ZIS dan DSKL pada tahun 2002 sampai 2019 sebagai contohnya

**Tabel 1.2**  
**Data Pertumbuhan Pengumpulan ZIS dan DSKL Tahun 2002 – 2019**

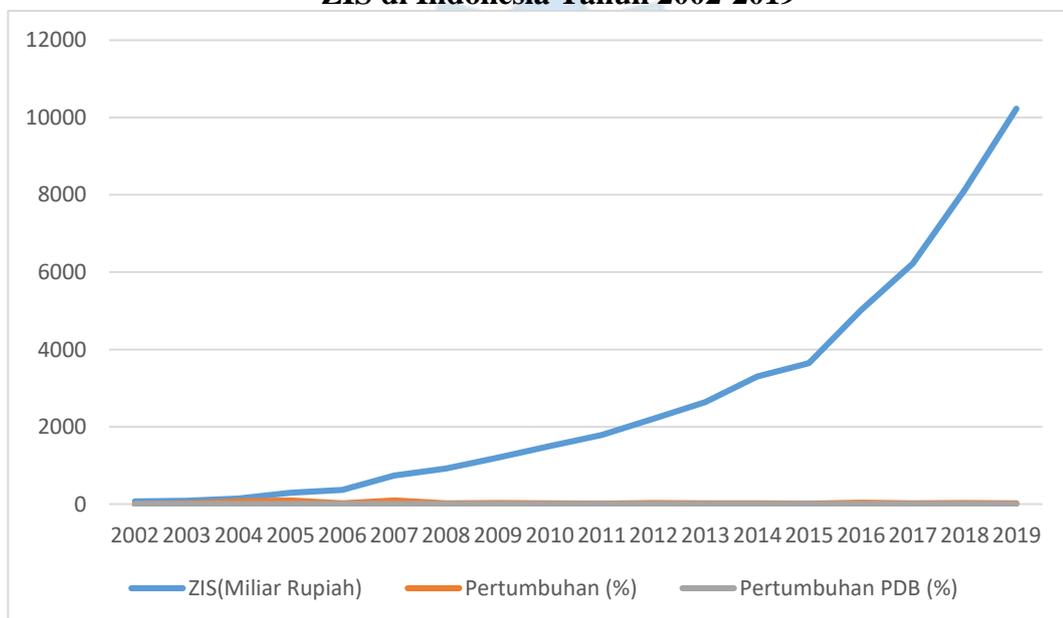
<i>Tahun</i>	<i>ZIS(Miliar Rupiah)</i>	<i>Pertumbuhan (%)</i>	<i>Pertumbuhan PDB (%)</i>	<i>Keterangan</i>
2002	68,39	0	3,7	
2003	85,28	24,70	4,1	
2004	150,09	76,00	5,1	Tsunami Aceh
2005	295,52	96,90	5,7	
2006	373,17	26,28	5,5	
2007	740,00	98,30	6,3	Gempa yogya
2008	920,00	24,32	6,2	
2009	1.200,00	30,43	4,9	
2010	1.500,00	25,00	6,1	
2011	1.792,00	15,27	6,5	
2012	2.212,00	27,94	6,23	
2013	2.639,00	19,30	5,78	
2014	3.300,00	25,05	5,02	
2015	3.650,00	10,61	5,04	
2016	5.017,29	37,46	5,02	
2017	6.224,37	24,06	5,07	
2018	8.117,60	30,42	5,17	
2019	10.227,94	26,00	5,02	

	Rata-rata	34,33	5,36	
--	-----------	-------	------	--

Sumber : Pid.Baznas.Co.Id

Berdasarkan data yang sudah di himpun di atas menunjukkan adanya kenaikan dari periode sebelumnya ke periode selanjutnya dalam artian tahun ketahun, misal dari tahun 2002 mencapai angka Rp 68,39 Milliar sampai di tahun 2019 angkanya naik menjadi Rp 10.227 Miliar dan kenaikan tumbuhnya dari sebelumnya mencapai 26 %.

**Grafik 1.1**  
**ZIS di Indonesia Tahun 2002-2019**



Sumber : Pid.Baznas.Co.Id

Adapun dinegara Indonesia kita untuk lembaga tersebut atau OPZ ( Organisasi Pengelola Zakat) antara lain ada BASNAZ dan LAZ itu dibentuk dalam UU no 38 tahun 1999.dan juga didukung UU no 23 tahun 2011. Tujuannya adalah bisa mengelola dana umat dengan baik sesuai harapan negara dan agama. Walaupun notabennya adalah lembaga keuangan non profit.<sup>18</sup> Dan Baznas ini di kenal dengan

<sup>18</sup> Agus Purwanto, Nyoman Trisna Herawati, Anantawikrama Tungga Atmadja, "Analisis Implementasi Psak 109 Pada Organisasi Non Profit Berbasis Religius(Studi Kasus Pada Baznas Kabupaten Buleleng)", E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Vol:7no:1, 2017, Hal 2-3

lembaga non profit yang berbasis religius yang didirikan pemerintah bergerak di bidang sosial untuk membantu masyarakat<sup>19</sup>

Penelitian ini nantinya akan dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tuban. Melihat bagaimana proses distribusi yang ada disana yakni di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tuban. Dan nantinya akan melihat pengaruh distribusi ZIS nya terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban.

Syarat *Mustahiq* atau yang berhak menerima itu ada 8 golongan. Dalam surat Al-aubah ayat 60 Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>20</sup>

Ayat tersebut menjelaskan 8 golongannya adalah yang pertama Pertama fakir (sengsara hidupnya) tidak punya harta dan tidak bisa terpenuhi kebutuhannya, yang kedua miskin ialah (kehidupannya kurang) tidak cukup untuk kesehariannya, Ketiga orang yang mengumpulkan zakat atau Amil, Ke-empat Muallaf (orang yang baru memeluk Islam), kelima riqab ( budak atau hamba sahaya), yang ke-enam gharim atau orang yang berhutang dan hutangnya itu buat kepentingan umat walaupun ia masih mampu membayarnya,yang ketujuh Sabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah SWT), kedelapan ialah ibnu sabil (orang yang dalam perjalanan jauh bukan untuk maksud tujuan buruk atau maksiat).

Peran zakat juga sangat penting untuk membantu masyarakat yang kurang mampu (belum sejahtera). Sedangkan distribusinya di Indonesia memiliki dua kategori yaitu produktif (dibentuk dalam barang-barang produktif) dan konsumtif (secara langsung). Harapan distribusi yang meningkat nantinya akan ada

<sup>19</sup> www.jojonomic.com di akses pada tanggal 11 juli 2020 pukul 19.01

<sup>20</sup> Al jumanatul Ali, Al Qur'an Dan Terjemahan Hal 196

pemasukan tambahan bagi para mustahiq dan itu diharapkan mengurangi angka kemiskinan dan juga mensejahterahkan masyarakat.

**Tabel 1.3**  
**Perkembangan Distribusi Zakat Infaq Shadaqah (ZIS)**  
**Baznas Kabupaten Tuban selama Tahun 2015-2021**

Tahun	Penerimaan	Pendistribusian	Mustahiq
2015	Rp. 2.804.236.313	Rp 2.304.236.313	6.000
2016	Rp. 3.849.720.216	Rp 2.479.373.276	10.000
2017	Rp. 5.348.970.781	Rp 4.251.925.715	12.160
2018	Rp. 7.528.618.408	Rp 7.620.524.643	21.267
2019	Rp 10.117.355.542	Rp 9.202.481.487	22.887
2020	Rp. 15.238.127.708	Rp 13.938.674.500	59.207
2021		Rp 13.075.793.500	53.075

Sumber : Baznas.tubankab.go.id<sup>21</sup>

Berdasarkan data tabel diatas yang diperoleh dari Laporan keuangan dan Publikasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tuban yang telah di olah, memperlihatkan bahwa pertumbuhan nilai ZIS selama tahun 2015 sampai dengan 2021 bergerak secara konsisten selalu mengalami kenaikan kecuali tahun 2021 yang terdapat faktor tertentu yang lainnya di 7 tahun tersebut, Namun secara umum pertumbuhan nilai Distribusi ZIS ini cukup positif.

Maka dari itu untuk BAZNAS Tuban juga harus bisa berkontribusi untuk bisa berpengaruh pada pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban untuk membantu menurunkan angka kemiskinan lewat distribusi penyaluran dan program kerjanya.

Sama halnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga menjadi salah satu tolak ukur dalam kemiskinan. Berikut adalah data PDRB di setiap kota atau Kabupaten Provinsi Jatim (Jawa Timur):

**Tabel 1.4**  
**Data PDRB Kabupaten dan Kota di Jawa Timur Tahun 2015-2022**

Kabupaten/Kota Jawa Timur	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Kabupaten Pacitan	02.49	-1.84	05.08	05.47	0,2347	05.21	05.10
Kabupaten Ponorogo	03.19	-0.90	05.01	05.27	05.10	05.29	05.25
Kabupaten Trenggalek	0,17	-2.17	05.08	05.03	05.02	05.00	05.03
Kabupaten Tulungagung	03.53	-3.09	05.32	05.21	05.08	05.02	0,2354

<sup>21</sup> Baznas.tubankab.go.id Diakses pada tanggal 29/6/2022 Pukul 19:00

Kabupaten Blitar	03.02	-2.29	05.12	05.10	05.07	05.08	05.06
Kabupaten Kediri	03.06	-2.41	05.06	05.07	0,2292	05.02	0,2278
Kabupaten Malang	03.12	-2.68	05.49	05.55	05.43	05.30	05.27
Kabupaten Lumajang	03.14	-2.79	0,209	05.00	05.05	0,2153	0,2097
Kabupaten Jember	04.00	-2.98	05.51	05.02	05.11	05.23	05.36
Kabupaten Banyuwangi	04.08	-3.58	05.55	0,267	05.45	05.38	06.01
Kabupaten Bondowoso	03.49	-1.36	05.30	05.08	05.03	0,234	0,2326
Kabupaten Situbondo	03.26	-2.33	05.44	05.46	05.07	05.00	0,2264
Kabupaten Probolinggo	03.35	-2.12	04.56	04.47	04.46	0,2201	0,2194
Kabupaten Pasuruan	04.34	-2.03	0,266	0,259	0,2583	05.44	05.38
Kabupaten Sidoarjo	04.21	-3.69	0,2771	06.01	0,2639	05.51	05.24
Kabupaten Mojokerto	04.12	-1.11	0,2646	0,269	0,259	05.49	0,2535
Kabupaten Jombang	03.24	-1.98	05.10	05.29	05.36	05.40	05.36
Kabupaten Nganjuk	0,167	-1.71	05.36	05.38	05.26	05.29	05.18
Kabupaten Madiun	03.34	-1.69	05.42	05.10	05.42	05.27	05.26
Kabupaten Magetan	03.04	-1.64	05.04	05.21	05.09	05.31	05.17
Kabupaten Ngawi	02.55	-1.69	05.05	05.21	05.07	05.21	05.08
Kabupaten Bojonegoro	-5.54	-0.40	06.34	04.39	10.25	0,941	17.42
Kabupaten Tuban	03.00	-5.85	05.14	05.15	0,2347	0,2292	0,2285
Kabupaten Lamongan	03.43	-2.65	05.43	05.44	05.50	0,2681	0,2618
Kabupaten Gresik	0,18	-3.68	05.42	0,265	0,266	05.49	0,2924
Kabupaten Bangkalan	-2.07	-5.59	01.03	04.22	03.53	0,0458	-2.66
Kabupaten Sampang	00.22	-0.29	0,1007	04.11	0,2146	06.17	02.08
Kabupaten Pamekasan	03.41	-2.54	0,2306	05.46	05.04	05.35	05.32
Kabupaten Sumenep	0,126	-1.13	00.14	0,169	0,1431	02.58	01.27
Kota Kediri	02.50	-6.25	05.47	05.43	05.14	05.54	05.36
Kota Blitar	04.28	-2.28	0,2667	0,265	0,2625	0,2611	0,2556
Kota Malang	04.21	-2.26	0,259	0,258	0,2563	0,2507	0,2507
Kota Probolinggo	04.06	-3.64	0,2736	0,273	0,2694	0,2694	0,2681
Kota Pasuruan	0,169	-4.33	05.56	05.54	05.47	05.46	05.53
Kota Mojokerto	0,17	-3.69	0,2535	0,264	0,2535	0,2618	0,2597
Kota Madiun	0,217	-3.39	0,2563	0,275	0,2729	0,2708	06.15
Kota Surabaya	04.29	-4.85	06.09	06.19	06.13	06.00	0,2757
Kota Batu	04.04	-6.46	06.51	06.50	06.56	0,2924	0,2979

Jawa Timur	03.57	-2.33	05.53	05.47	05.46	05.57	05.44
------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber : Jatim.bps.go.id<sup>22</sup>

Berdasarkan tabel di atas bisa lihat selama kurun waktu 2015-2021 pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur menjadi sangat fluktuatif atau naik turun, hal tersebut dapat dilihat dari tingkat rata-rata Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Jawa Timur dari tahun 2015-2021.

Lalu untuk mengetahui angka PDRB di Kabupaten Tuban kita bisa melihat data di bawah ini :

**Tabel 1.5**  
**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tuban**  
**Tahun 2015-2021**

Kategori	Uraian	2015	2016	20017	2018	2019	2020*	2021
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.839.85 9,5	7.093.10 0,9	7.315.39 9,4	7.304.03 1,1	7.398.43 3,0	7.295.39 1,3	7.395.21 8,1
B	Pertambangan dan Penggalian	3.428.63 2,0	3.561.24 0,9	3.761.07 5,9	3.877.42 4,2	3.912.01 7,7	3.722.65 4,6	3.729.44 0,8
C	Industri Pengolahan	11.478.3 08,2	11.992.2 88,5	12.684.9 17,7	13.916.2 69,0	14.912.0 25,4	13.205.9 51,5	13.597.8 43,1
D	Pengadaan Listrik dan Gas	47.193,6	47.678,6	48.089,3	49.756,3	51.293,2	50.816,5	51.388,7
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	23.285,5	24.214,6	24.823,0	25.808,5	27.016,4	28.012,3	29.774,8
F	Konstruksi	4.504.34 7,4	4.558.99 5,9	4.608.15 8,9	4.627.26 5,8	4.891.42 4,9	4.725.37 9,5	4.663.50 1,0
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	4.891.56 8,5	5.282.02 2,2	5.690.65 7,9	6.020.70 2,5	6.371.02 5,9	5.753.64 7,5	6.235.89 6,6
H	Transportasi dan Pergudangan	221.855, 1	242.201, 9	260.348, 8	284.175, 6	310.956, 5	295.197, 8	318.131, 7
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	321.522, 0	350.633, 1	380.678, 2	410.119, 5	445.841, 6	404.192, 2	413.996, 6
J	Informasi dan Komunikasi	2.021.67 4,7	2.206.81 7,3	2.370.19 8,2	2.545.59 8,2	2.733.78 4,3	2.976.42 2,2	3.219.25 3,7
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	752.643, 4	805.707, 7	836.836, 0	872.159, 0	913.201, 1	913.444, 4	920.667, 5
L	Real Estate	534.774, 9	578.733, 4	605.419, 2	641.224, 1	677.824, 7	690.398, 9	712.733, 2
M,N	Jasa Perusahaan	76.210,8	81.751,4	86.462,2	92.732,2	98.998,1	92.584,8	94.602,5
O	Administrasi Pemerintahan,	855.858, 6	911.746, 2	940.843, 1	979.451, 1	1.014.89 6,2	997.439, 8	1.001.70 0,5

<sup>22</sup> Jatim.bps.go.id Diakses Pada tanggal 15/10/2021 Pukul 22.30

	Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib							
P	Jasa Pendidikan	612.911,9	654.467,3	685.417,1	718.613,2	770.823,3	785.916,4	789.169,4
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	189.494,5	202.721,2	215.314,4	232.065,9	249.638,2	271.353,2	286.601,3
R,S,T,U	Jasa lainnya	455.887,3	487.434,7	513.070,1	542.297,0	576.894,1	496.209,8	524.769,8
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		37.256.027,8	39.081.755,6	41.027.709,4	43.139.693,2	45.356.094,4	42.705.012,5	43.984.689,2
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		36.704.486,9	38.569.198,7	40.516.196,7	42.592.055,2	44.800.240,8	42.175.428,6	43.505.629,1

Sumber : Tubankab.bps.go.id<sup>23</sup>

Di Kabupaten Tuban sendiri dari tahun ketahun mengalami situasi yang Fluktuatif atau naik Turun pada tahun 2015-2021, pada tahun 2019 mengalami kenaikan dan di tahun 2020 mengalami penurunan yakni sebesar 42.705012,5 lalu mengalami kenaikan lagi di tahun 2021. PDRB adalah sebuah cara dari tiap negara untuk melihat daya tumbuh kembang suatu negara, bisa diartikan juga faktor perekonomian salah satunya untuk melihat semuanya aspeknya.<sup>24</sup> PDRB pada dasarnya adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh semua unit usaha di suatu wilayah tertentu, atau merupakan nilai total barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi pada suatu daerah.

Salah satu indikator lain yang cukup strategis untuk mengentaskan kemiskinan ialah IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Hasil dari pembangunan sebuah wilayah juga bisa dilihat dari sini dengan caranya yaitu melihat perubahan transformasi pembangunan dari tahun sebelumnya yang sudah ada menjadi lebih baik lagi. Karena kemajuan suatu wilayah atau daerah tertentu itu merupakan alat ukur untuk mendeteksi sukses atau tidaknya IPM ini terutama pada faktor manusianya. IPM (Indeks Pembangunan Manusia) atau dalam istilah menduniannya ialah HDI (Human Development Index) merupakan alat ukur tercapainya harapan hidup, angka melek huruf atau pengetahuan, dan juga standarisasi hidup yang layak itu diberbagai negara didunia IPM (Indeks Pembangunan Manusia) adalah ukuran untuk melihat sebuah negara itu maju, berkembang, atau tertinggal karena kita bisa

<sup>23</sup> [www.Tubankab.bps.go.id](http://www.Tubankab.bps.go.id)

<sup>24</sup> Ridzky Giovanni, "Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2009-2016", Economics Development Analysis Journal 7 No 1 Tahun 2018, Hal 25

melihat faktor perekonomian dari cara ini. Selain itu IPM (Indeks Pembangunan Manusia) juga mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia juga dan termasuk Kabupaten Tuban.<sup>25</sup>

Berikut adalah data IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Kabupaten Tuban, Jika ditinjau IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Hasil dari pembangunan sebuah wilayah terutama Kabupaten Tuban juga bisa dilihat dari sini dengan caranya yaitu melihat perubahan transformasi pembangunan dari tahun sebelumnya.

**Tabel 1.6**  
**IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Kabupaten Tuban 2015-2021**

NO.	Komponen	TAHUN (Years)						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Daya Beli (Ribuan Rupiah)/ <i>Purchasing Power Parity (thousand rupiahs)</i>	8,94	9.353	9.540	10.048	10.499	10.238	10,38
2	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) / <i>Mean years school (years)</i>	6,2	6,25	6,48	6,52	6,81	6,95	7,18
3	Harapan Lama Sekolah (Tahun) / <i>Expected years school (years)</i>	12,07	12,17	12,18	12,19	12,2	12,21	12,22
4	Angka harapan Hidup (Tahun) / <i>Lives expected (years)</i>	70,55	70,67	70,8	71,01	71,26	71,43	71,56
5	IPM / <i>Human Development Index</i>	65,52	66,19	66,77	67,43	68,37	68,4	68,91

Sumber : [tubankab.bps.go.id](http://tubankab.bps.go.id)<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Lavenia Kotambunan , Sutomo Wim Palar , Richard L.H Tumilaar ,” Analisis Pengaruh Belanja Modal Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara (Dalam Tahun 2005-2014” ), Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 16 No. 01, 2016, Hal 928

<sup>26</sup> [tubankab.bps.go.id](http://tubankab.bps.go.id) diakses pada tanggal 30/5/2022 pukul 13:48

Awalnya IPM (Indeks Pembangunan Manusia) diperkenalkan di tahun 1990 oleh organisasi dibawah naungan PBB, namanya adalah *United Nation Development Programme* (UNDP). indeks pembangunan manusia (IPM) sebenarnya cukup luas sekali namun aspek kemanusiaan adalah aspek strategis dan aspek utama dalam hal ini. Antara lain ialah harapan hidup (sehat dan peluang panjang hidupnya), melek huruf atau pendidikan standar(ketrampilan dan pengetahuan) , serta taraf hidup yang layak (kehidupan yang layak serta ekonomi yang terpenuhi).<sup>27</sup>

Untuk mengukur tercapainya kualitas hidup manusia bisa menggunakan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) ini di peruntukkan untuk melihat kualitasnya, IPM (Indeks Pembangunan Manusia) terbangun atas tiga pondasi dasar, ketiganya itu saling berpengaruh karena mencakup berbagai macam faktor kehidupan. Harapan hidup (sehat dan peluang panjang hidupnya), melek huruf atau pendidikan standar(ketrampilan dan pengetahuan) , serta taraf hidup yang layak (kehidupan yang layak serta ekonomi yang terpenuhi) dalam hal ini akan terfokus pada daya beli masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan melihatnya dari faktor pendapatan serta nilai pengeluaran sehingga termasuk didalamnya adalah untuk mensejahterahkan hidupnya apakah disebut layak atau tidak.

Walaupun ada tiga dimensi pokok sebenarnya ini juga saling berhubungan seperti jika pendapatannya tinggi maka kualitas pendidikannya tinggi, jika pendidikannya tinggi maka semakin banyak orang yang akan memperoleh pengalaman dalam pendidikannya terutama dibidang pelatihan lalu suatu saat nanti produktivitasnya juga akan tinggi dan akan menjamin perekonomiannya dimasa yang akan datang. Begitu juga dengan kesehatan yang berpengaruh pada pendapatan, jika manusianya sehat maka otomatis daya hasil produktivitasnya juga akan tinggi dan maksimal, begitupun sebaliknya kesehatan juga akan menunjang pendidikan karena dari kesehatan manusia dapat tetap belajar sehingga memperoleh pengetahuan yang lebih. Ketiganya saling berkoelasi satu sama lain. Namun disini

---

<sup>27</sup> Mukarramah, Cindy Yolanda, Muhammad Zulkarnain, "Analisis Pengaruh Belanja Modal Dan IPM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Timur", Jurnal Samudra Ekonomika, VOL. 3, No.2 2019, Hal 107-108

peneliti berfokus pada faktor pendapatan atau daya beli yang di dapatkan dari standar hidup yang layak karena itu adalah aspek prekonomian yang berhubungan dengan kemiskinan<sup>28</sup>

SDM (sumber daya manusia) adalah faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Kualitas SDM (sumber daya manusia) bisa terlihat dari IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dalam hal ini peran pemerintah dalam berbagai kebijakan di tiga bidang yang berpengaruh pada SDM (sumber daya manusia) yaitu yang antara lain membangun fasilitas pendidikan, kesehatan, dan memberikan pelatihan praktis bagi para masyarakat sehingga dikemudian hari dapat bersaing dan nantinya bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari karena pendapatannya juga sehingga daya belinya juga terpenuhi (taraf hidup yang layak).<sup>29</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Hasil dari penjelasan uraian yang sudah dibahas di atas maka dirumuskan sebuah rumusan masalah antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) terhadap pengentasan kemiskinan di kabupaten Tuban?
2. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap pengentasan kemiskinan di kabupaten Tuban?
3. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban?
4. Bagaimana pengaruh Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban?

## **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>28</sup> Ari Kristin Prasetyoningrum, "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah* Volume 6, Nomor 2, 2018, Hal 222

<sup>29</sup> Ridho Andykha, Herniwati Retno Handayani, Nenik Woyanti, "Analisis Pengaruh Pdrb, Tingkat Pengangguran, Dan Ipm Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah", *Jurnal Media Ekonomi Dan Manajemen*, Vol. 33 No. 2, 2018, Hal 115

Dari hasil yang diuraikan dengan rumusan masalah maka di ambil tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk melihat bagaimana analisis Pengaruh Efektivitas Pendistribusian Zakat, Infaq, Shadaqah Taerhadap Pengentasan kemiskinan Di Kabupaten Tuban.
2. Untuk melihat bagaimana analisis Pengaruh Produk domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Pengentasan kemiskinan Di Kabupaten tuban.
3. Untuk melihat bagaimana analisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Tuban.
4. Untuk melihat bagaimana analisis pengaruh Zakat, Infaq, Shadaqoh (ZIS), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Tuban.

#### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Manfaat Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis  
Diharapkan Penelitian ini dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan, Khususnya dalam bidang Ekonomi Islam bagi para akademisi yang ingin mengetahui Pengaruh Zakat, Infaq, Shodaqah sebagai Lembaga Keuangan non profit dalam bidang religius terhadap pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Tuban.
2. Secara Praktis  
Dapat berguna untuk bahan koreksi dan bahan evaluasi lapangan, Khususnya bagi lembaga keuangan non profit seperti BAZNAS Kabupaten Tuban, dalam mendistribusikan dalam mengimplementasikan program kerja agar dapat membantu mengentaskan Kemiskinan Kabupaten Tuban.

#### **E. Kerangka Berfikir**

Kerangka Penelitiannya disini adalah menganalisis dan melihat pengaruh (ZIS) Zakat, Infaq, Shadaqoh terhadap kemiskinan, Pengaruh (PDRB)Produk Domestik Regional Bruto terhadap kemiskinan, Pengaruh (IPM Indeks Pembangunan

Manusia) terhadap Kemiskinan secara Simultan dan Pengaruh Zakat, Infaq, Shadaqoh (ZIS), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan secara Parsial.

## 1. Konsep Distribusi

Konsep yang harus dilakukan agar tercipta masyarakat yang sejahtera adalah mewujudkan perekonomian yang baik, sama halnya dengan ekonomi islam yang juga memberikan nilai tawar proses distribusi yang baik pula. Dalam ekonomi islam sendiri konsep nya ialah distribusi kekayaan. Dalam konsep ini diharapkan bisa menjadi solusi untuk terpecahnya masalah-masalah sosial ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Konsep islami dalam ranah distribusi itu akan terwujud dan terselesaikan bila orientasinya pada SDM nya (Sumber daya manusia).

Mengembangkan SDM (Sumber daya manusia) dengan cara distribusi yaitu menggunakan asas keadilan sehingga nantinya dapat bertitik tumpu pada cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya yang notabennya tidak terkekang oleh tendensi apapun. Distribusi yang di maksud adalah melihat bagaimana proses yang dilakukan dengan cara yang benar serta yang menjadi perhatian disini adalah memastikan bahwa harta-harta orang yang mampu itu tidak tertahan oleh apapun sehingga bermanfaat kepada orang lain, misalnya pembayaran zakat, infaq, dan shadaqah.<sup>30</sup>

## 2. Konsep Efektivitas

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Pengertian yang lain efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan

---

<sup>30</sup> Eja Armaz Hard, *Gharim Sebagai Penerima Zakat Perspektif Yusuf Al-Qaradawi (Studi Distribusi Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur)*, Disertasi, 2020, Hal 25-26

sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai.

Aspek-aspek efektivitas berdasarkan pendapat efektivitas dapat dijelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek antara lain: (1) Aspek tugas atau fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga suatu program BAZNAS akan efektif jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik dan peserta didik belajar dengan baik, (2) Aspek rencana atau program, yang dimaksud dengan rencana atau program disini adalah rencana yang terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dikatakan efektif; (3) Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya, (4) Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai.<sup>31</sup>

Jelas konsep ini sangat di butuhkan oleh BAZNAS karena dengan adanya konsep ini maka berjalannya peran BAZNAS sebagai sebuah lembaga tentunya akan lebih terstruktur dan efektif.

### 3. Konsep Pemberdayaan (Fiqh Tamkin)

Dalam pengertiannya sendiri pemberdayaan berarti sebuah proses mengubah suatu suasana yang diperuntukkan bagi manusia sehingga terciptanya kondisi yang makmur adil dan beradab dalam kehidupannya. Suatu proses pemberdayaan (empowerment) ialah sebuah situasi berdaya bagi setiap individual maupun kelompok agar terbangunnya interaksi sosial yang baik sehingga nantinya mudah di kembangkan dan difasilitasi. Masyarakat yang

---

<sup>31</sup> Idtesis.com di akses pada tanggal 29/6/2022 pukul 20:25

berdaya (*power*) baik bagi individual maupun kelompok diharapkan nantinya dalam menciptakan sebuah kontrol sehingga dapat melakukan apa yang diinginkannya sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga tercipta perubahan yang lebih baik.

Pemberdayaan dalam kemiskinan yang dimaksud disini ialah suatu usaha memberdayakan masyarakat miskin sehingga nanti harapannya akan tercipta kemandirian baik dalam sosial, politik, karakter, etos kerja, budaya, terutama dalam hal ekonominya. Karena bukan hanya ekonominya saja yang harus diperbaiki lewat pemberdayaan tapi juga hal yang lain karena kemiskinan itu merupakan masalah yang multidimensional.

Pemberdayaan politik misalnya bukan melulu tentang ekonomi saja, namun pemerintah saat ini melihat kemiskinan hanya sisi itu saja sedangkan jika dilihat lebih jauh kebanyakan pemerintah melihat sisi ekonomi saja. Sehingga, jika proses ekonomi yang dari PDB saja itu melihatnya dikira udah selesai dan menimbulkan stigma seolah-olah proyek pembangunan penanggulangan kemiskinan juga ikut selesai. Padahal, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, problematika kemiskinan tidak melulu soal materiil saja.

Terciptanya kondisi yang makmur adil dan beradab dalam kehidupan adalah dambaan setiap individu dalam menjalani hidupnya. Hal ini sangat tepat dengan konsep pemberdayaan islam yaitu tidak menilai dari materiil saja namun non materiil sehingga sangat komprehensif aspek lainnya, dalam hal ini juga pemberdayaan terbilang sangat bagus.

Pemberdayaan dalam islam atau (*tamkim*) adalah memberikan suatu kebebasan kepada masyarakat agar dapat berkembang dan perkembangannya itu bisa merasakan dari berbagai sisi yang lain. Dan manusia diharapkan mampu memahami makna tersebut. Karena individu yang berdaya jika dalam dirinya terdapat kekuatan atau daya (*power*) sehingga bisa memenuhi kebutuhan

materiil dan non materiil. Tidak cukup itu saja polanya juga harus mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW dan atas dasar karena Allah SWT.<sup>32</sup>

#### 4. Konsep Kemiskinan

Hal yang menjadi pokok masalah adalah tentang kemiskinan di banyak negara-negara didunia termasuk negara kita, manusia sangat sering menghadapi masalah ini. Masalah ini adalah masalah tentang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat yang ada banyak disekitar kita bahkan menjadi masalah kompleks di berbagai negara lain, yang berarti masalah ini juga di perhatikan di dunia, walaupun berdampak beda namun masalah ini tetap ada ditiap masing-masing negara walaupun itu dinegara maju sekalipun.<sup>33</sup>

Menurut agama islam miskin adalah orang yang bisa di katakan *kasab* atau (usaha) tetapi belum cukup untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya atau disebut kebutuhan primer.<sup>34</sup> Masalah ini adalah masalah tentang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Bertambahnya masalah tentang kemiskinan biasanya di tambah dengan masalah-masalah lain semacam kriminalitas bahkan bisa menjadi pembatas interaksi sosial yang ada dimasyarakat dan menciptakan garis stratifikasi yang ada didalamnya. Bahkan dampak yang timbul juga bisa merusak peradaban yang suah ada. Nabi Muhammad pernah berkata bahwa kemiskinan ini bisa menimbulkan kekufuran, maka dari itu masalah ini harus segera di atasi dengan menciptakan strategi-strategi baru untuk mengatasinya sehingga dapat menimbulkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Terbatali hak oleh kemiskinan mengakibatkan yang pertama memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, kedua Hak rakyat untuk memperoleh perlindungan hukum, ketiga Hak rakyat untuk memperoleh rasa aman, keempat Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan hidup (sandang, pangan, dan papan) yang terjangkau, kelima Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pendidikan, keenam Hak rakyat untuk memperoleh akses atas

<sup>32</sup> Yulizar D. Sanrego, Moch Taufiq, " *Fiqih Tamkin (Fiqih Pemberdayaan)* ", (Jakarta : Qisthi Press, 2016) Hal 64

<sup>33</sup> Nunung Nurwati, *Kemiskinan : Model Pengukuran, Permasalahan Dan Alternatif Kebijakan*, Jurnal Kependudukan Padjadjaran, Vol. 10, No. 1, 2008, Hal 2

<sup>34</sup> Ahmad Hasan Ridwan, "*Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*", (Bandung : Pustaka Setia , 2013) Hal 199

kebutuhan kesehatan, ketujuh Hak rakyat untuk memperoleh keadilan, kedelapan Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik dan pemerintahan, kesembilan Hak rakyat untuk berinovasi, kesepuluh Hak rakyat menjalankan hubungan spiritualnya dengan Tuhan, kesebelas Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam menata dan mengelola pemerintahan dengan baik.

Sebegitu pentingnya memberantas kemiskinan menurut agama islam sehingga sangat harus ditekan perkembangannya, jika kemiskinan sangat banyak maka kerusakan dan kehancuran akan banyak ditemukan, menanggulangi masalah ini juga untuk menyelamatkan aqidah umat islam, lalu bisa memelihara rumah tangga dengan baik, dan masyarakat juga akan stabil kehidupannya. Kata miskin itu ada istilah dalam bahasa Arab yang sebenarnya menyatakan kefakiran yang sangat. Dalam firman Allah SWT di jelaskan di Al-Balad ayat 16

أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۝ ١٦

“atau kepada orang miskin yang sangat fakir”<sup>35</sup>

Sedangkan untuk kata fakir yang berasal dari bahasa Arab juga al-faqr, yang bermakna membutuhkan (al-ihtiyaj). Seperti firman Allah Swt dalam surat Al-Qashash Ayat 24 yang berbunyi:

فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ - ٢٤

“Maka dia (Musa) memberi minum (ternak) kedua perempuan itu, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa, “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan (makanan) yang Engkau turunkan kepadaku” .<sup>36</sup>

Kondisi serba kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup maka menyebabkan lemahnya ekonomi dan strukturnya. Apalagi kemiskinan ini menjadikan kehidupan yang tidak seimbang dan tumbuh kembang perekonomian jadi kurang merata. Jadi kurang mampuan manusia yang belum

<sup>35</sup> Al jumanatul Ali, Al Qur'an Dan Terjemahan , Hal 594

<sup>36</sup> Al jumanatul Ali, Al Qur'an Dan Terjemahan , Hal 349

bisa terpenuhi kebutuhan pokoknya atau primernya akan jadi perhatian bersama kita semua dan membutuhkan berbagai lembaga untuk membantu menyelesaikannya. Dalam hal ini maksud nya adalah manusia yang belum terpenuhi kehidupan layak nya serta pemenuhan standarnya atau kemiskinan konsumsi, lalu semua definisinya itu belum semuanya tercakup untuk mengatasinya.<sup>37</sup>

Maka dari sinilah zakat bisa diuraikan dengan kemiskinan yang ada hubungannya yaitu antara yang mampu dengan yang kurang mampu. zakat yang berdaya diharapkan nantinya bisa menjadi pelindung untuk masyarakat dari masalah ekonomi. Dan dalam hal ini lembaga-lembaga pengelola zakat yang akan menjadi sarana distribusinya. Distribusi pendapatan dalam suatu ekonomi dalam islam yah hal ini karena bisa menciptakan rasa yang kaya tidak terbebani dan yang miskin merasa terbantu. Yang nantinya bisa di dimanfaatkan lebih baik lagi baik berupa modal ataupun yang lainnya.<sup>38</sup>

Maka sebab itulah peneliti ingin melihat kesinambungan antara konsep tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqah dengan gabungan Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta juga variabel Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai analisis tambahan lainnya yang tujuannya melihat bagaimana potensi ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) berperan dalam hal perekonomian terutama di Kabupaten Tuban. Harapan dari penelitian ini adalah antara ketiga variabel ZIS, PDRB, dan IPM sebagai X1, X2, dan X3 terhadap Pengentasan Kemiskinan menjadi variabel Y. Sehingga nanti dapat ditarik kesimpulan apakah berkorelasi atau tidak, sehingga dapat terlihat hubungannya dengan kemiskinan yang merupakan masalah prekonomian pembangunan.

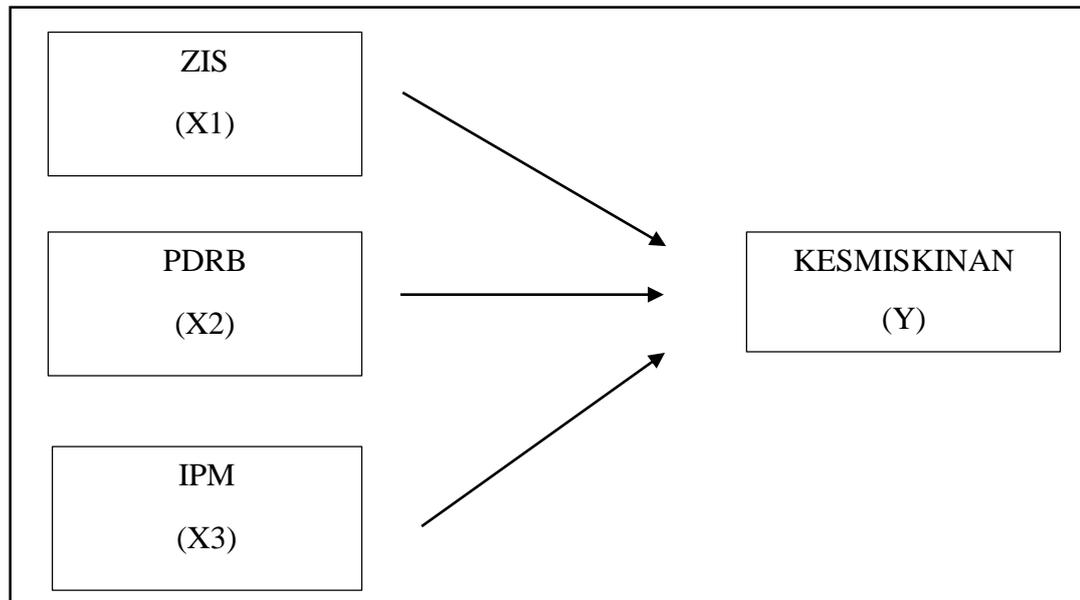
Dalam hal ini bisa ditarik sebuah kerangka penelitian sebagai berikut dan akan di bahas lebih dalam lagi antara hubungan satu sama lain secara parsial dan simultan:

---

<sup>37</sup>Husna Ni'matul Ulya, "Paradigma Kemiskinan Dalam Perspektif Islam Dan Konvensional", Volume 01, No. 01 Januari – Juni 2018, Hal 132-139

<sup>38</sup>Junaidi Safitri, "Implementasi Konsep Zakat Dalam Al-Qur'an Sebagai Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia", Jurnal At-Tasyri' Volume IX, No. 1, 2017, Hal 2

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Berfikir**



### F. Hipotesis

Pengertian hipotesis sendiri adalah dugaan atau jawaban sementara dan didapatkan dari rumusan masalah yang harus dibuktikan kebenarannya. Dan hasil dari hipotesis ini menggunakan unsur jawaban yang sementara yang ada dalam teori diatas. Hipotesis dalam penelitian ini memperlihatkan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya dalam bentuk pernyataan yang ditulis secara singkat padat serta jelas dan bisa diuji secara empiris bisa juga melalui rumus-rumus statistik.

Dalam penelitian ini yang sudah dibahas diatas maka akan merumuskan sebuah rumusan masalah sebagai berikut serta merupakan dugaan sementara dari sebuah penelitian, dalam hal ini maka ada dua faktor cara penyusunannya yaitu secara parsial (per variabel) dan simultan (semua variabel) :

1.  $H_0 : \beta_1 = 0$  : Diduga tidak terdapat pengaruh antara penyaluran dana Zakat, Infaq Shadaqah (ZIS) terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban.

$H_a : \beta_1 \neq 0$  : Diduga terdapat pengaruh antara penyaluran dana Zakat, Infaq Shadaqah (ZIS) terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban.

2.  $H_0 : \beta_1 = 0$  : Diduga tidak terdapat pengaruh antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban.

$H_a : \beta_1 \neq 0$  : Diduga terdapat pengaruh antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban.

3.  $H_0 : \beta_1 = 0$  : Diduga tidak terdapat pengaruh antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban.

$H_a : \beta_1 \neq 0$  : Diduga terdapat pengaruh antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban.

4.  $H_0 : \beta_1 = 0$  : Diduga tidak terdapat pengaruh antara penyaluran dana Zakat Infaq Shadaqah (ZIS), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban.

$H_a : \beta_1 \neq 0$  : Diduga terdapat pengaruh antara penyaluran dana Zakat Infaq Shadaqah (ZIS), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban.

### **G. Hasil Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan uraian yang sudah di sampaikan diatas maka peneliti juga mengambil penelitian yang sudah ada (terdahulu) agar nantinya dijadikan pembandingan atau tolak ukur yang akan di bandingkan dengan penelitian ini.

Pertama, Isro'iyatul Mubarakah, Irfan Syauqi Beik, Tony Irawan (2017), melakukan penelitian yang berjudul "Dampak Zakat terhadap Kemiskinan dan Kesejahteraan Mustahik (Kasus : BAZNAS Provinsi Jawa Tengah)". Dalam penelitian ini dijelaskan Dengan adanya bantuan zakat, pendapatan rumah tangga mustahik mengalami peningkatan, Dengan adanya bantuan zakat terjadi perubahan pada spiritual mustahik, Klasifikasi rumah tangga mustahik berdasarkan Model CIBEST (Center Of Islamic Business And Economic Studies) yang masuk kategori

sejahtera (kuadran I) sebanyak 94 rumah tangga dan miskin material (kuadran II) sebanyak 5 rumah tangga juga ada miskin spiritual tidak ada serta yang masuk kategori miskin absolut hanya 1 rumah tangga, Berdasarkan Model CIBEST menunjukkan bahwa dengan adanya bantuan zakat meningkatkan kesejahteraan mustahik dan menurunkan indeks kemiskinan material mustahik.<sup>39</sup>

Kedua, Muhammad Nizar (2016), Melakukan penelitian yang berjudul “Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Zis) Di Masjid Besar Syarif Hidayatullah Karangploso Malang” dari sisi pemanfaatannya dapat digolongkan kepada dua model. Pertama, model distribusi konsumtif yaitu pendistribusian zakat, infaq dan shodaqah yang pemanfaatannya langsung digunakan oleh mustahik dan habis dalam jangka pendek serta pendayagunaannya tidak menimbulkan pengaruh secara ekonomi dan pemberdayaan mustahik, model ini dibagi menjadi dua model yaitu model distribusi konsumtif tradisional dan model konsumtif kreatif, yang Kedua model distribusi produktif yaitu pendistribusian zakat infaq dan shodaqah yang pemanfaatannya tidak langsung habis serta pendayagunaannya menimbulkan pengaruh secara ekonomi dan pemberdayaan mustahik. Model ini hanya berupa model distribusi produktif kreatif.<sup>40</sup>

Ketiga, Dahlia Oktamia, Ahmad Zainuri, dan Peny Cahaya Azwari (2020) melakukan penelitian yang berjudul “Social Return on Investment pada Program Ekonomi Local Business Development Dompot Dhuafa Sumatera Selatan” dari penelitian ini menunjukkan bahwa program LBD (Local Business Development) masih layak dilakukan karena pengembalian investasi masih diatas nilai satu. Selain itu, nilai dampak tertinggi diperoleh oleh Penerima Manfaat utama. Hal tersebut mengindikasikan bahwa program berjalan tepat sasaran. Namun, dampak yang

<sup>39</sup> Isro'iyatul Mubarakah, Irfan Syauqi Beik, Tony Irawan, “Dampak Zakat terhadap Kemiskinan dan Kesejahteraan Mustahik”, (Kasus : BAZNAS Provinsi Jawa Tengah)”, Jurnal Al-Muzara'ah Vol.5, No.1, 2017, Hal 49

<sup>40</sup> Muhammad Nizar, “Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat, Infaq Dan shadaqah (Zis) Di Masjid Besar Syarif Hidayatullah Karangploso Malang”, Jurnal Malia, Volume 8, Nomor 1, 2016 Hal 59

ditimbulkan belum signifikan sehingga perlu upaya perbaikan untuk memajukan program dan menghasilkan dampak yang lebih besar lagi.<sup>41</sup>

Keempat, Siti Nur Azizah (2018) melakukan penelitian yang berjudul “Efektivitas Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pada Program Pentasharufan Dana Zakat Di Baznas Kota Yogyakarta” dari penelitian ini kinerja BAZNAS masih efisien yakni mencapai kategori highly effective, namun hanya program Jogja Sehat yang tidak mendapat alokasi dengan dasar bahwasanya program Jogja Sehat telah mendapatkan alokasi dalam pentasharufan dana infak dan shadaqahnya.<sup>42</sup>

Kelima, Dewi Purwanti (2020) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Zakat, Infak, dan Shadaqah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia” Dari hasil analisis menggunakan regresi panel dengan driscoll and kraay standars errors, Zakat Infak dan Shadaqah (ZIS) yang berhasil dihimpun terbukti berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun masih perlu dukungan dari semua pihak terutama pemerintah agar BAZNAS dapat menjadi lembaga yang mengumpulkan zakat, infak, dan shadaqah secara nasional untuk mengoptimalkan potensi zakat Indonesia yang sangat besar.<sup>43</sup>

Keenam, Jasmine Fitri Andrini (2019) Melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Dan Penyaluran Zakat, Infak, Dan Shadaqah oleh badan Amil Zakat Nasional Terhadap Kemiskinan Di Indonesia” dari penelitian ini menjelaskan bahwa Variabel PDB, pengangguran, inflasi, rasio gini, dan distribusi ZIS dari BAZNAS secara bersama-sama dapat memengaruhi kemiskinan di dalam jangka panjang dan jangka pendek.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> Dahlia Oktamia, Ahmad Zainuri, dan Peny Cahaya Azwari, “Social Return on Investment pada Program Ekonomi Local Business Development Dompot Dhuafa Sumatera Selatan”, Jurnal Intizar Vol. 26 No. 2, 2020, Hal 71

<sup>42</sup>Siti Nur Azizah, “Efektivitas Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pada Program Pentasharufandana Zakat Di Baznas Kota Yogyakarta”, Jurnal el-JIZYA, Vol. 6 No. 1, 2018, Hal 109

<sup>43</sup> Dewi Purwanti, “Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 6 no. 01, 2020, Hal 107

<sup>44</sup> Jasmine Fitri Andrini, “Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Dan Penyalura Zakat, Infak, Dan Sedekabadan Amil Zakat Nasional Terhadap Kemiskinan Di Indonesia”, Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, Vol. 6 No. 7, 2019, Hal 1476-1477

Ketujuh, Eris Munandar, Mulia Amirullah, Nila Nurochani(2020) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (Zis) Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan”, dari penelitian ini menjelaskan bahwa penyaluran dana ZIS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia periode 2006-2017. Artinya jika penyaluran dana ZIS meningkat sebesar 1% maka kemiskinan akan menurun sebesar 8,189%. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Meskipun demikian terdapat kecendrungan positif antara pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Indonesia periode 2006-2017. Penyaluran dana ZIS dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kemiskinan di Indonesia periode 2006-2017.<sup>45</sup>

Kedelapan, Afa Rosfalita Nur Alifia (2020) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Zakat, Infak, Sedekah (Zis), Pengangguran, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2003 – 2018”, penelitian ini menjelaskan Variabel penyaluran ZIS (X1) memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan Indonesia. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang digunakan yaitu jika semakin tinggi penyaluran ZIS, maka akan mengurangi kemiskinan di Indonesia, Variabel pengangguran (X2) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Dapat diartikan jika semakin meningkatnya tingkat pengangguran, maka akan juga meningkatkan kemiskinan di Indonesia, Variabel pertumbuhan ekonomi (X3) memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Dapat diartikan jika pertumbuhan ekonomi naik, maka akan menyebabkan tingkat kemiskinan di Indonesia turun. Namun pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap naik turunnya tingkat kemiskinan di Indonesia.<sup>46</sup>

Kesembilan, Widia Astuti (2018) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan PDRB, Tingkat Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap

---

<sup>45</sup>Eris Munandar, Mulia Amirullah, Nila Nurochani, “Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (Zis) Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan”, Jurnal Al-Mal: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, Vol 01 , No. 01, 2020, hal. 36

<sup>46</sup> Afa Rosfalita Nur Alifia,” *Pengaruh Zakat, Infak, Sedekah (Zis), Pengangguran, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2003 – 2018*”, Jimfeb Universitas Brahwijaya, Vol 1 No 1, 2020, Hal 13

Kemiskinan (Study Kasus Wilayah Desa Parung Kab. Bogor)” penelitian ini menjelaskan Variabel PDRB mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan mempengaruhi kemiskinan. Hal ini dikarenakan bahwa peningkatan PDRB yang terjadi di Parung tidak selalu diikuti oleh penurunan kemiskinan di Parung, Variabel Pendidikan (melek huruf) mempunyai pengaruh negatif dan signifikan mempengaruhi kemiskinan, pengangguran mempunyai pengaruh negatif dan signifikan mempengaruhi kemiskinan. Secara simultan Laju pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), tingkat pendidikan, kesehatan dan pengangguran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.<sup>47</sup>

Kesepuluh, Noor Zuhdiyaty dan David Kaluge (2017) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir (Studi Kasus Pada 33 Provinsi)” penelitian ini menjelaskan bahwa berdasarkan hasil uji maka dapat dilihat bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan sebesar - 0.289890. Hal tersebut menandakan bahwa antara IPM dengan kemiskinan memiliki hubungan terbalik, yaitu ketika IPM mengalami penurunan sebesar 1 persen dapat menaikkan kemiskinan sebesar - 0.289890, begitu sebaliknya. Sementara pada pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Untuk TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) juga tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.<sup>48</sup>

Untuk bisa mengetahui atau melihat hasil perbedaan juga persamaan maka kita lihat perbandingannya pada tabel berikut ini.

**Tabel 1.7**  
**Kerangka Pemikiran Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Isro'iyatul Mubarokah, Irfan Syauqi	Dampak Zakat terhadap Kemiskinan dan	1) Dampak Zakat terhadap Kemiskinan	1) Dampak Zakat terhadap

<sup>47</sup> Widia astuti, “Pengaruh Pertumbuhan PDRB, Tingkat Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan (Study Kasus Wilayah Desa Parung Kab. Bogor)”, Jurnal JENIUS. Vol. 1, No. 3, 2018, Hal 212

<sup>48</sup> Noor Zuhdiyaty dan David Kaluge, “Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir (Studi Kasus Pada 33 Provinsi)”, Jurnal Jibeka, Volume 11, Nomor 2, 2017 Hal 29 - 30

	Beik, Tony Irawan (2017)	Kesejahteraan Mustahik (Kasus : BAZNAS Provinsi Jawa Tengah)		Kesejahteraan Mustahik
2	Muhammad Nizar (2016)	Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Zis) Di Masjid Besar Syarif Hidayatullah Karangploso Malang	1) Pengelolaan Distribusi Zakat, Infaq Dan Shadaqah (ZIS)	1) Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
3	Dahlia Oktamia, Ahmad Zainuri, dan Peny Cahaya Azwari (2020)	Social Return on Investment pada Program Ekonomi Local Business Development Dompot Dhuafa Sumatera Selatan	1) Distribusi Zakat melalui program sosial dari Investasi	1) Pembangunan ekonomi lokal dengan basis bisnis
4	Siti Nur Azizah (2018)	Efektivitas Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat	1) Distribusi Zakat terhadap Kemiskinan	1) Efektivitas Kinerja Keuangan

		Nasional (Baznas) Pada Program Pentasharufan Dana Zakat Di Baznas Kota Yogyakarta		Badan Amil Zakat Nasional
5	Dewi Purwanti (2020)	Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	1) Pengaruh distribusi Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap Kemiskinan	1) Pertumbuhan Ekonomi
6	Jasmine Fitri Andriani (2019)	Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Dan Penyaluran Zakat, Infak, Dan Sedekah oleh badan Amil Zakat Nasional Terhadap Kemiskinan Di Indonesia	1) Penyaluran Zakat, Infak, Dan Sedekah terhadap kemiskinan	1) Pengaruh Variabel Makro Ekonomi
7	Eris Munandar, Mulia Amirullah, Nila	Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (Zis) Dan Pertumbuhan	1) Pengaruh distribusi Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap Kemiskinan	1) Pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi

	Nurochani (2020)	Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan		
8	Afa Rosfalita Nur Alifia (2020)	Pengaruh Zakat, Infak, Sedekah (Zis), Pengguguran, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2003 – 2018	1) Pengaruh distribusi Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap Kemiskinan	1) Pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi
9	Widia Astuti (2018)	Pengaruh Pertumbuhan PDRB, Tingkat Pendidikan Dan Pengguguran Terhadap Kemiskinan (Study Kasus Wilayah Desa Parung Kab. Bogor)	1) PDRB terhadap Kemiskinan	1) Pengaruh Variabel ZIS 2) Pengaruh variabel Pengguguran Terbuka
10	Noor Zuhdiyaty dan David	Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di	1) Pengaruh IPM terhadap Kemiskinan	1) Pengaruh Variabel Pertumbuhan Ekonomi

	Kaluge (2017)	Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir (Studi Kasus Pada 33 Provinsi		2) Pengaruh Variabel Tingkat Pengangguran
--	------------------	--	--	--

Secara umum dampak penelitian sebelumnya tentang distribusi zakat terhadap pengentasan kemiskinan memang tidak terlalu signifikan tapi cukup berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Apabila pendistribusian tepat dan dengan potensi zakat bisa ditingkatkan lagi maka akan lebih bisa mempengaruhi lagi untuk bisa membantu masyarakat mengingat potensi zakat yang sangat besar.

Perbedaan penelitian yang mendasar terdahulu dengan sekarang ini adalah digunakannya variabel pembanding yakni variabel PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang dipusatkan ke Daya beli sebagai tumpuan utama pada variabel ini. Memang pada dasarnya adalah melihat pengaruh ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) memang sama-sama sebagai peran utama untuk pendistribusiannya, namun variabel pembandingnya akan juga digunakan untuk melihat bagaimana pengaruhnya kepada pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban dalam kurun waktu 2015-2021.